

Pengaruh Pandangan Sosial, Usia, dan Kepercayaan Kepada Pemerintah Terhadap Praktik Penggelapan Pajak di Surabaya

Maria Angelina Sutiono dan Yenni Mangoting

Program Akuntansi Pajak Program Studi Akuntansi Universitas Kristen Petra
maria.sutiono@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pandangan sosial, usia, dan kepercayaan kepada pemerintah terhadap praktik penggelapan pajak di Surabaya. Jumlah responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah 130 Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya yang berwirausaha. Teknik analisa yang digunakan adalah teknik regresi linier berganda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga variabel tersebut secara simultan dan parsial mempengaruhi Praktik penggelapan pajak di Surabaya. Semakin tinggi pandangan sosial bahwa penggelapan pajak adalah hal yang wajar, semakin tinggi pula kemungkinan seorang Wajib Pajak untuk menggelapkan pajak. Sedangkan semakin tua usia Wajib Pajak dan semakin tinggi tingkat kepercayaan seorang Wajib Pajak terhadap pemerintah maka semakin rendah kemungkinan seorang Wajib Pajak untuk menggelapkan pajak.

Kata kunci: pandangan sosial, usia, kepercayaan terhadap pemerintah, penggelapan pajak

ABSTRACT

This study aimed to know the influence of the social opinions, age, and trust in government to tax evasion behavior in Surabaya. Total respondents in this study were 130 entrepreneur taxpayers. The analysis technique used was multiple linear regression. The results showed that all three variables influenced simultaneously and partially the tax evasion behavior in Surabaya. It was concluded that the more people in society believe that tax evasion is fair, the higher possibility people do tax evasion.. In addition, the older the age of taxpayers and the higher taxpayers' trust in government the lower possibility people do tax evasion in Surabaya.

Keywords : Social opinions, age, trust in government, tax evasion

PENDAHULUAN

Penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah tindak pidana karena merupakan rekayasa subyek (pelaku) dan obyek (transaksi) pajak untuk memperoleh penghematan pajak dengan cara melawan hukum (*unlawfully*). Penggelapan pajak merupakan tindakan yang dapat mempengaruhi jumlah penerimaan negara. Praktik penggelapan pajak di Indonesia diyakini menjadi salah satu faktor yang membuat tidak tercapainya target pendapatan negara di sektor pajak beberapa tahun terakhir ini. Tahun 2013 penerimaan negara dari sektor pajak meleset 1.071 triliun rupiah atau hanya mencapai 93.41% dari target.

Praktik penggelapan pajak di Indonesia diyakini menjadi salah satu faktor yang membuat tidak tercapainya target pendapatan negara di sektor pajak beberapa tahun terakhir ini. Tahun 2013 penerimaan

negara dari sektor pajak meleset 1.071 triliun rupiah atau hanya mencapai 93.41% dari target (www.liputan6.com). Andin Hadiyanto, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan juga menambahkan bahwa Ditjen Pajak akan mengalami kesulitan menutupi deviasi sekitar lima persen atau sebesar 1.110,2 triliun rupiah dari target pajak tahun 2014. (Tempo, 9 April 2014).

Penelitian mengenai praktik penggelapan pajak dilakukan oleh Sandmo (2005). Sandmo mengungkapkan bahwa pandangan teman, keluarga, atau rekan kerja dari WP cenderung mempengaruhi seorang WP untuk menggelapkan atau tidak menggelapkan pajak. Secara umum Sandmo melaporkan bahwa semakin banyak orang yang menggelapkan pajak, maka tindakan penggelapan pajak semakin dinilai wajar. Meskipun Sandmo melakukan penelitian tersebut di Eropa, namun faktor tersebut akan sangat relevan untuk

diteliti di Indonesia. Salah satu alasannya adalah rakyat Indonesia merupakan tipe penduduk yang sangat sosial, dimana norma dan anggapan sosial sering kali menentukan keputusan yang akan diambil oleh individu. Selain itu, tindakan penggelapan pajak semakin dianggap hal yang biasa, khususnya di antara wajib pajak pribadi. Mereka akan menganggap "normal" jika ada teman yang tidak membayar pajak.

Parameter usia juga menarik untuk diteliti. Seperti yang disampaikan oleh Teten Madsuki, Mantan Sekjen Transparency Internasional Indonesia (TII), menyatakan bahwa, saat ini banyak ditemukan rekening-rekening "gemuk" di antara PNS muda. Teten Madsuki menyebut fenomena ini sebagai "fenomena gayus" yang ditandai dengan dimilikinya rekening miliaran rupiah pada saat usia masih di bawah 30 tahun (AntaraneWS, 5 Desember 2011). Data Badan Statistik Indonesia menunjukkan bahwa dalam dua puluh lima tahun yang akan datang, jumlah penduduk Indonesia usia produktif akan bertambah. Hal ini membuat usia menjadi salah satu faktor yang menarik untuk diteliti

Parameter lain yang menarik untuk diteliti adalah kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Seperti yang dilaporkan Lewis, Webley & Furnham. (1995), mereka menemukan bahwa jika pemerintah menggunakan pajak yang dibayarkan untuk memperkaya diri sendiri, maka akan muncul keenganan yang besar dari WP untuk membayar pajak. Mereka beranggapan lebih baik pajak digelapkan daripada dibuang percuma (dikorupsi oleh pemerintah). Di Indonesia sendiri kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah cenderung menurun akhir-akhir ini. Sekjen TII, Dadang Trisasongko menyatakan bahwa 65% dari masyarakat Indonesia menilai bahwa pemerintah belum serius dalam memberantas korupsi. Angka ini menurut Dadang mengalami peningkatan dari survey sebelumnya (Tempo, 11 Juli 2013). Oleh karena itu, menarik untuk diteliti apakah kepercayaan masyarakat yang cenderung negatif akan mempengaruhi praktik penggelapan pajak di Indonesia.

Banyak teori dan model penggelapan pajak dikembangkan tetapi sebagian besar teori tersebut tidak dapat menjelaskan perbedaan tingkat penggelapan pajak yang berbeda-beda antar negara meskipun hukuman yang diberikan relatif sama (Schneider & Klinglmair. 2004). Cowel (1990) berpendapat adanya parameter lain untuk menjelaskan penggelapan pajak sebagai fenomena sosial. Setidaknya ada dua teori yang dikembangkan untuk menjelaskan hal tersebut. Model pertama dikembangkan oleh Allingham dan Sandmo (1972) yang kemudian dikembangkan lebih lanjut menjadi teori kerjasama bersyarat oleh Traxler (2006).

Dalam model A-S menyatakan bahwa probabilitas untuk terdeteksi meningkat seiring jumlah pelaku penggelapan pajak meningkat. Meskipun

demikian WP juga melakukan pengamatan sendiri tentang probabilitas untuk terdeteksi dari WP di sekitarnya. WP mungkin telah mengamati tetangga atau rekan-rekan yang menggelapkan pajak namun lolos begitu saja. Ini berarti bahwa model ini dapat dimodifikasi lebih lanjut bahwa probabilitas subjektif WP akan deteksi sebagai fungsi penggelapan pajaknya sendiri dan dari pandangannya akan WP lain. Jika sekarang persepsi dari seorang WP akan penggelapan pajak yang dilakukan WP lain tinggi, maka probabilitas subjektifnya (p) akan menurun. Hal ini akan membuat WP tersebut untuk lebih menggelapkan pajak (Sandmo, 2005).

Model A-S juga didukung oleh teori kerjasama bersyarat yang dikembangkan oleh Traxler (2006). Saat pelaku penggelapan pajak meningkat dalam suatu populasi, sanksi sosial terkait dengan penggelapan akan berkurang, sehingga membuat secara psikologis "murah" bagi pembayar pajak lain untuk menghindari pajak (bahkan saat tingkat audit dan hukuman tetap sama). Kepatuhan pajak bagi seorang individu kemudian saling bergantung dengan tindakan orang lain.

Kedua teori tersebut didukung oleh penelitian Kalinsky, *et al.* (2004) yang menyatakan bahwa tidak maksimalnya penerimaan pajak di Amerika Serikat disebabkan oleh pandangan WP Amerika Serikat bahwa penggelapan pajak bukanlah hal yang terlalu serius. Temuan ini juga dilaporkan oleh Demir (2011) yang menemukan bahwa tindakan penggelapan pajak yang dilakukan oleh seorang WP di Turki dipengaruhi oleh pandangan masyarakat di sekitarnya.

Meskipun kedua penelitian itu memberikan hasil yang sama, variabel ini masih menarik diteliti di Indonesia. Salah satu alasannya adalah karena di Indonesia belum ada penelitian langsung yang mengaitkan pandangan masyarakat dengan penggelapan pajak. Oleh karena itu disusunlah hipotesis pertama sebagai berikut:

H₁₀: Pandangan sosial di sekitar Wajib Pajak berpengaruh secara signifikan terhadap praktik penggelapan pajak.

Secara umum diyakini bahwa semakin matang usia seseorang maka kemampuan dan kemauan untuk taat hukum semakin tinggi. Hal ini dinyatakan oleh dua teori perkembangan moral yang dimulai oleh dan disempurnakan oleh Kohlberg (1963). Kohlberg membagi tahap perkembangan moral menjadi enam bagian. Setiap individu pasti melalui perkembangan tersebut secara runut, sehingga tidak ada yang dapat melompati setiap tahapan tanpa melaluinya. Saat seorang masih muda, ia cenderung berada di tingkatan pertama dan kedua, yaitu tahapan saat seorang anak kecil selalu menurut apa yang diperintahkan oleh orang tuanya dan individu tersebut cenderung untuk melakukan apa yang dianggapnya baik. Pada tingkatan ketiga, setiap individu

cenderung untuk mencari persetujuan orang disekitarnya perihal tindakan yang buruk maupun baik. Pada tingkatan keempat individu tersebut mulai menyadari adanya peraturan atau hukum yang berlaku dan berusaha untuk mematuinya. Tingkatan kelima dan keenam merupakan tahap terakhir dalam perkembangan moral seseorang, dimana setiap individu memiliki pikiran beretika yang timbul dari diri sendiri.

Teori ini didukung oleh Ruegger dan King (1992) yang menyatakan setiap orang akan menjadi lebih beretika ketika ia menjadi lebih tua. Meskipun demikian Sims, Cheng & Teegen. (1996) melaporkan siswa yang lebih tua cenderung lebih melanggar peraturan ketimbang siswa yang lebih muda. Cakupan Sims *et al.* mungkin terlalu sempit karena tidak menggunakan sampel orang dewasa. Babakus Cornwell, Mitchell & Schlegelmilch, (2004) menemukan bahwa faktor usia memberikan perbedaan dalam hal etika, tetapi hal itu juga dipengaruhi oleh faktor budaya. Orang-orang muda dari Britania Raya, Amerika Serikat, dan Perancis cenderung lebih tidak beretika dibanding orang-orang dewasa. Hasil ini berkebalikan dengan sampel dari Australia dan Hong Kong.

Penelitian yang menggabungkan secara langsung tindakan penggelapan pajak dan usia dilakukan oleh Alm dan Torgler (2004) yang menemukan bahwa orang yang lebih tua cenderung untuk menghindari tindakan penggelapan pajak. McGee dan Tyler (2007) juga melaporkan hal yang sama. Fiorio dan Zanardi (2007) juga melaporkan usia merupakan variabel penting dalam penelitian penggelapan pajak. Melihat fakta tersebut maka disusunlah hipotesis kedua sebagai berikut:

H₂₀: Usia Wajib Pajak berpengaruh secara signifikan terhadap praktik penggelapan pajak.

Sebelumnya, sebagian besar penelitian tentang kepatuhan pajak difokuskan terutama pada teori-teori mereka sendiri (McKerchar, 2001). Pendekatan yang lebih baik telah disusun oleh Schmolders (1959) yang menghubungkan ekonomi dan pendekatan perilaku. Pendekatan ini kemudian dikenal sebagai pendekatan psikologis fiskal, yang juga telah disempurnakan oleh Hasseldine dan Bebbington (1991). Pendekatan psikologis fiskal memberikan wawasan yang lebih baik ke dalam cara orang berperilaku dalam situasi ekonomi dengan mengeksplorasi efek dari isu-isu ekonomi dan tindakan pemerintah tentang sikap masyarakat dalam upaya untuk mendorong perilaku positif dalam mematuhi peraturan pajak. Pendekatan ini menekankan pentingnya kebijakan positif yang dikembangkan oleh pemerintah untuk meningkatkan kerjasama antara pembayar pajak dan pemerintah.

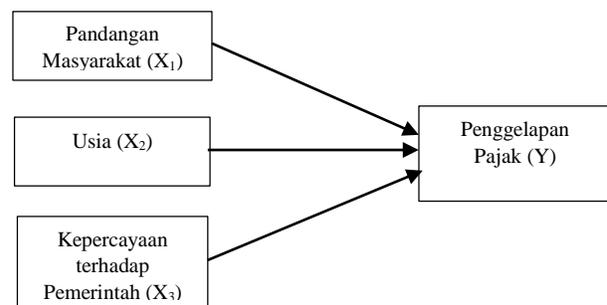
Ivanyina, Moumouras & Rangazas, (2010) menemukan bahwa di negara-negara berkembang pemerintah yang korup akan menurunkan pendapatan

negara di sektor pajak atau dengan kata lain penggelapan pajak meningkat. Demir (2011) juga melaporkan bahwa pelayanan publik yang baik akan menurunkan praktik penggelapan pajak di Turki. Mohd Ali (2013) pandangan masyarakat Malaysia terhadap pemerintah yang positif akan menurunkan praktik penggelapan pajak di sana. Dari hasil-hasil penelitian dan teori di atas maka disusunlah hipotesis ketiga sebagai berikut:

H₃₀: Kepercayaan Wajib Pajak terhadap pemerintah berpengaruh secara signifikan terhadap praktik penggelapan pajak.

METODE PENELITIAN

Model analisis adalah suatu gambaran tentang variabel-variabel yang akan digunakan untuk melakukan analisis data sehingga dapat diperoleh kesimpulan. Terdapat tiga faktor dalam WP yang merupakan variabel independen yang akan dianalisis pengaruhnya terhadap variabel dependen yaitu penggelapan pajak. Oleh karena itu Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1
Model Analisa

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dan bertujuan untuk mengetahui pengaruh faktor pandangan sosial, usia, dan kepercayaan terhadap pemerintah baik secara parsial maupun simultan terhadap perilaku penggelapan pajak WP.

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah tiga variabel independen yaitu faktor pandangan sosial, usia, dan kepercayaan terhadap pemerintah serta satu variabel dependen yaitu terhadap perilaku penggelapan pajak WP di Surabaya.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer melalui pengisian kuesioner yang diperoleh langsung dari Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) yang berwirausaha dan terdaftar di wilayah Surabaya.

Populasi dari penelitian ini adalah semua WP OP yang berwirausaha di wilayah Surabaya. Dari beberapa

sumber yang diolah diperkirakan jumlah wirausaha di Surabaya adalah sekitar 62.204 jiwa.

Penentuan sampel dilakukan dengan metode *simple random sampling* dengan menggunakan rumus Slovin seperti di bawah ini.

$$n = \frac{N}{1 + N(Moe)^2}$$

di mana:

n = Jumlah sampel

N = jumlah populasi

Moe = *Margin of Error Max* (kesalahan yang masih ditoleransi, diambil 10 persen).

Sehingga jumlah sampel yang diambil adalah 100 responden.

Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala *likert* lima poin (kecuali usia yang hanya empat poin) untuk mengukur semua variabel yang berjumlah 18 pertanyaan. Sebelum dianalisis, data dilakukan uji validitas dan reliabilitas.

Analisis data penelitian ini dengan menggunakan regresi linier berganda, yaitu metode analisis untuk lebih dari satu variabel independen. Penelitian ini menggunakan program pengolahan data yaitu IBM SPSS versi 20. Dalam penelitian ini, data yang didapat akan dianalisa dalam tiga tahapan. Tahap pertama adalah pengujian kuesioner untuk menganalisa akurasi dan konsistensi sampel. Berikutnya adalah pengujian asumsi klasik yang akan menguji apakah data-data yang didapat memenuhi asumsi klasik. Terakhir akan dilakukan pengujian hipotesis untuk menentukan apakah hasil penelitian menerima atau menolak hipotesis.

Uji Validitas digunakan untuk mengetahui sah atau tidaknya kuesioner penelitian. Uji dilakukan dengan membandingkan koefisien *r* hitung dengan koefisien *r* tabel. Apabila nilai *r* hitung lebih besar dari *r* tabel mengindikasikan item tersebut valid. Sebaliknya jika *r* hitung lebih kecil dari *r* tabel berarti item penelitian tidak valid untuk digunakan (Ghozali, 2006).

Uji Reliabilitas digunakan untuk mengukur Kuesioner penelitian yang merupakan indikator dari konstruk atau variabel. Menurut Ghozali (2006) Kuesioner dikatakan reliabel jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pengujian dilakukan dengan menghitung besarnya nilai Cronbach's alpha masing-masing instrumen dari satu variabel. Suatu variabel dikatakan reliabel jika besarnya nilai Cronbach's Alpha lebih dari 0,7 (Ghozali, 2006).

Uji Reliabilitas digunakan untuk mengukur Kuesioner penelitian yang merupakan indikator dari konstruk atau variabel. Menurut Ghozali (2006) Kuesioner dikatakan reliabel jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pengujian dilakukan dengan

menghitung besarnya nilai Cronbach's alpha masing-masing instrumen dari satu variabel. Suatu variabel dikatakan reliabel jika besarnya nilai Cronbach's Alpha lebih dari 0,7 (Ghozali, 2006).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha di Surabaya Barat, dengan jumlah sampel 130. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner. Kuesioner awal disebarkan sebanyak 120, namun sebesar 10 kuesioner tidak kembali dan 10 lainnya tidak sesuai dengan kriteria. Dari 100 kuesioner tersebut ternyata tidak tersebar secara merata pada responden usia di bawah 19 tahun dan usia di atas 51 tahun sehingga jumlah sampel ditambah sebesar 50 untuk disebarkan pada kelompok usia tersebut. Dari 50 sampel yang disebarkan, sebesar 20 kuesioner tidak sesuai dengan kriteria responden. Dengan demikian, jumlah kuesioner yang digunakan sebesar 130.

Dari total 130 kuesioner yang disebarkan di beberapa daerah di Surabaya, jumlah responden didominasi dengan responden laki-laki. Jenjang pendidikan responden didominasi oleh D3/S1. Sedangkan usia didominasi oleh kelompok usia 29 – 39 tahun. Hasil statistik deskriptif lainnya disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1
Profil Demografi Responden

Demografi	Kategori	Jumlah Responden	%
Usia	< 28 Tahun	29	22
	29 Tahun - 39 Tahun	40	31
	40 Tahun - 50 Tahun	33	25
	> 51 Tahun	28	22
Jenis Kelamin	Pria	115	88
	Wanita	15	12
Pendidikan	SD	23	18
	SMP	24	19
	SMA	31	24
	D3/S1	45	35
	S2/S3	7	5
Status Pernikahan	Menikah	64	49
	Belum Menikah	66	51

Tabel 4.3 Deskripsi Jawaban Responden Mengenai Variabel Pandangan Sosial

Indikator	Mean	St Dev
x1.1	3.56	.996
x1.2	3.62	.838
x1.3	3.58	.833
x1.4	3.61	.911
x1.5	3.69	.905
x1.6	3.48	.917
Pandangan Sosial (X1)	3.59	

Berdasarkan hasil pemaparan sebelumnya secara keseluruhan variabel pandangan sosial menghasilkan rata-rata sebesar 3.59 pada kategori setuju, artinya mayoritas 130 orang responden pada penelitian ini berkeyakinan bahwa pandangan masyarakat di sekitar wajib pajak terhadap pajak dapat mempengaruhi wajib pajak tersebut dalam memutuskan untuk menggelapkan atau tidak menggelapkan pajak

Tabel 4.5 Deskripsi Jawaban Responden Mengenai Variabel Usia

Usia	Mean	St Dev
< 28 tahun	3.90	0.44
29 tahun -39 tahun	3.52	0.46
40 tahun – 50 tahun	3.48	0.47
> 51 tahun	2.76	0.37

Berdasarkan tabel 4.4 dan 4.5 dapat diketahui bahwa nilai tertinggi dari usia responden kelompok 1 yaitu usia di bawah 28 tahun yang paling banyak melakukan penggelapan pajak dengan nilai mean (3,90). Usia kelompok 2 yaitu usia 29 tahun sampai 39 tahun menunjukkan mean (3,52) yang berarti mean penggelapan pajak semakin menurun. Nilai terendah ditunjukkan pada kelompok usia 4 yaitu usia di atas 51 tahun dengan mean (2,76) yang berarti responden dengan pendapat netral dalam hal pernah melakukan penggelapan pajak. Mean (3,48) dihasilkan oleh usia responden kelompok 3 yaitu usia 40 tahun sampai 50 tahun yang masih masuk dalam predikat setuju pernah melakukan penggelapan pajak.

Tabel 4.7 Deskripsi Jawaban Responden Mengenai Variabel Kepercayaan Terhadap Pemerintah

Indikator	Mean	St Dev
x3.1	3.85	0.88
x3.2	3.87	0.82
x3.3	3.59	0.89
x3.4	3.52	1.06
x3.5	3.63	0.87
x3.6	3.28	1.02
Kepercayaan Terhadap Pemerintah (X3)	3.67	

Secara keseluruhan variabel kepercayaan terhadap pemerintah mempunyai rata-rata sebesar 3.67 dengan kategori setuju artinya mayoritas responden pada penelitian ini masyarakat Indonesia tidak percaya pada pemerintah yang sedang menjabat, khususnya dalam kegiatan perpajakan.

Tabel 4.9 Deskripsi Jawaban Responden Mengenai Variabel Praktik Penggelapan Pajak

Indikator	Mean	St Dev
y1.1	3.34	1.00
y1.2	3.53	0.70
y1.3	3.45	0.82
y1.4	3.29	0.94
y1.5	3.67	0.75
y1.6	3.84	0.61
Praktik Penggelapan Pajak (Y)	3.43	

Secara keseluruhan variabel praktik penggelapan pajak mempunyai nilai mean sebesar 3.52 dengan kategori setuju yang artinya dari 130 orang responden wajib pajak pernah melakukan tindak pidana yang berupa rekayasa subyek (pelaku) dan obyek

(transaksi) pajak untuk memperoleh penghematan pajak dengan cara melawan hukum

Pengujian validitas menggunakan korelasi *Product Moment Pearson*. Hasil pengujian menunjukkan bahwa semua item pertanyaan memiliki tingkat signifikansi di bawah 0.05, sehingga item-item pertanyaan yang mengukur variabel penelitian dinyatakan valid.

Tabel 4.10 Hasil Uji Validitas Variabel Pandangan Sosial dan Kepercayaan Terhadap Pemerintah

Variabel	Indikator	Signifikansi	Keterangan
Pandangan Sosial	x1.1	0.000	Valid
	x1.2	0.000	Valid
	x1.3	0.000	Valid
	x1.4	0.000	Valid
	x1.5	0.000	Valid
	x1.6	0.000	Valid
Kepercayaan Terhadap Pemerintah	x3.1	0.000	Valid
	x3.2	0.000	Valid
	x3.3	0.000	Valid
	x3.4	0.000	Valid
	x3.5	0.000	Valid
	x3.6	0.000	Valid

Sedangkan untuk pengujian reliabilitas menggunakan nilai *Cronbach Alpha*. Hasil pengujian reliabilitas menunjukkan bahwa semua variabel memiliki nilai cronbach alpha > 0,7, sehingga item-item pertanyaan yang mengukur variabel penelitian dinyatakan reliabel.

Variabel	Alpha Cronbach	Keterangan
(X1)	0.748	Reliabel
(X3)	0.739	Reliabel
(Y)	0.779	Reliabel

Pendeteksian ada atau tidaknya multikolinieritas dilakukan dengan melihat nilai tolerance dan nilai Variance Inflation Factor (VIF). Hasil uji multikolinieritas disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2 Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel	Tolerance	VIF
Pandangan Sosial (X1)	0.912	1.096

Usia (X2)	0.955	1.047
Kepercayaan Terhadap Pemerintah (X3)	0.954	1.048

Berdasarkan Tabel 4.12 diatas diketahui bahwa nilai VIF pada ketiga variabel bebas semuanya kurang dari 10 dan tolerance > 0.1, sehingga dapat disimpulkan model regresi bebas dari multikolinieritas dengan demikian asumsi non multikolinieritas telah terpenuhi.

Uji Heterokedastisitas digunakan untuk menguji sama atau tidaknya varian antara residual observasi satu dengan yang lainnya. Jika varian residual tidak homogen, maka terjadi heteroskedastisitas. Heterokedastisitas diuji menggunakan uji *Park* dengan cara meregresikan antara variabel independen dengan nilai Ln residual kuadrat. Hasil uji disajikan pada table 3.

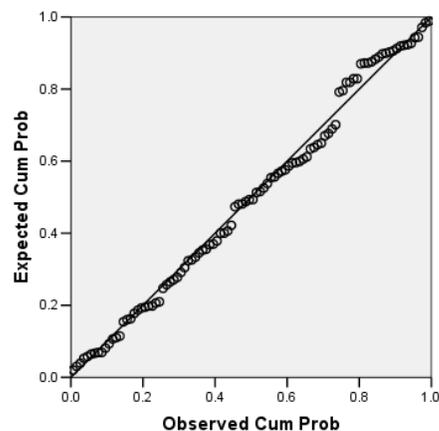
Tabel 3 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	t	Signifikansi
Pandangan Sosial (X1)	0.068	0.946
Usia (X2)	0.670	0.499
Kepercayaan Terhadap Pemerintah (X3)	-0.377	0.707

Berdasarkan Tabel 3 diatas dapat dilihat bahwa nilai signifikansi dari uji park pada ketiga variabel bebas lebih dari 0.05 dan nilai t hitung < t tabel (N=130 t tabel=1.980) sehingga disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi, dengan demikian asumsi non heteroskedastisitas telah terpenuhi.

Uji normalitas dapat dilakukan dengan menggunakan *Normal Probability Plot*. Jika titik-titik pada grafik menyebar di sekitar garis diagonal, maka disimpulkan bahwa asumsi normalitas terpenuhi

Dependent Variable: Praktik Penggelapan Pajak



Gambar 2 Normal Probability Plot

Normal Probability Plot regresi pada penelitian ini disajikan pada Gambar 2. Berdasarkan gambar di atas dapat diketahui bahwa titik-titik pada grafik menyebar di sekitar garis diagonal, sehingga dapat disimpulkan bahwa residual model regresi telah menyebar normal atau dengan kata lain asumsi normalitas telah terpenuhi.

Dari hasil analisis regresi diperoleh regresi antara pandangan sosial (X₁), usia (X₂) dan kepercayaan terhadap pemerintah (X₃) terhadap praktik penggelapan pajak (Y) dari wajib pajak yang berwirausaha di Kota Surabaya adalah,

$$Y = 4.970 + 0.155 X_1 - 0.272 X_2 - 0.389 X_3$$

Pengujian pengaruh pandangan sosial (X₁), usia (X₂) dan kepercayaan terhadap pemerintah (X₃) terhadap praktik penggelapan pajak (Y) menghasilkan nilai R (korelasi berganda) dan nilai R Square (koefisien determinasi berganda) sebagai berikut:

Tabel 4
Nilai R dan R Square

R	R Square
0.743	0.553

Berdasarkan Tabel 4 di atas diketahui bahwa nilai R yang diperoleh sebesar 0.718 menunjukkan bahwa hubungan pandangan sosial (X₁), usia (X₂) dan kepercayaan terhadap pemerintah (X₃) terhadap praktik penggelapan pajak (Y) tergolong kuat. Nilai R Square yang diperoleh sebesar 0.553, memiliki arti bahwa pandangan sosial (X₁), usia (X₂) dan kepercayaan terhadap pemerintah (X₃) memberikan perubahan terhadap praktik penggelapan pajak (Y) adalah sebesar 55.3% dan sisanya 44.7% dipengaruhi oleh faktor lain selain pandangan sosial, usia dan kepercayaan terhadap pemerintah.

Untuk mengetahui pengaruh secara serentak variabel bebas terhadap variabel terikat digunakan uji F. Dengan ketentuan jika F hitung > F tabel dan nilai signifikansi < 0.05 (α=5%), maka variabel bebas secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.

Hasil uji F antara pandangan sosial (X₁), usia (X₂) dan kepercayaan terhadap pemerintah (X₃) terhadap praktik penggelapan pajak (Y) adalah sebagai berikut:

Tabel 5
Hasil Uji F

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F hitung	Sig.
Regression	24.325	3	8.108	51.895	0.000
Residual	19.687	126	0.156		
Total	44.012	129			

Berdasarkan tabel 5 di atas hasil uji F diperoleh nilai F hitung = 51.895 > F tabel 3.95 (df1=3, df2=126, α=0.05) dan nilai signifikansi = 0.000 < 0.05, maka disimpulkan bahwa pandangan sosial (X₁), usia (X₂) dan kepercayaan terhadap pemerintah (X₃) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap praktik penggelapan pajak (Y). Hal ini berarti adanya faktor pandangan sosial, usia dan kepercayaan terhadap pemerintah secara bersama-sama akan mempengaruhi ada atau tidaknya praktik penggelapan pajak.

Untuk mengetahui pengaruh secara parsial variabel bebas terhadap variabel terikat digunakan uji t. Dengan ketentuan jika t hitung > t tabel dan nilai signifikansi < 0.05 (α=5%), maka variabel bebas secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.

Hasil uji t antara pandangan sosial (X₁), usia (X₂) dan kepercayaan terhadap pemerintah (X₃) terhadap praktik penggelapan pajak (Y) adalah sebagai berikut:

Tabel 6 Hasil Uji t

Variabel Bebas	t hitung	Sig.
Pandangan Sosial (X ₁)	2.616	0.010
Usia (X ₂)	-7.962	0.000
Kepercayaan Terhadap Pemerintah (X ₃)	-6.588	0.000

Dari Tabel 6 di atas dapat diketahui hasil uji t antara pandangan sosial terhadap praktik penggelapan pajak, menghasilkan nilai t hitung = 2.616 > t tabel 1.980 (df=126, α/2=0.025) dan nilai signifikansi = 0.010 < 0.05. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pandangan sosial berpengaruh signifikan terhadap praktik penggelapan pajak. Koefisien regresi pandangan sosial sebesar 0.155 menunjukkan bahwa pandangan sosial berpengaruh positif terhadap praktik penggelapan pajak, hal ini berarti apabila pandangan sosial semakin tinggi, maka akan meningkatkan praktik penggelapan pajak secara nyata. Berdasarkan hasil ini, hipotesis pertama penelitian yang menduga pandangan sosial secara parsial berpengaruh signifikan terhadap praktik penggelapan pajak terbukti kebenarannya.

Temuan ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Demir (2011) dengan mengambil sampel wajib pajak di Turki. Karlinsky, et al. (2004) juga melaporkan hasil yang sama bahwa keniatan seseorang untuk menggelapkan pajak dipengaruhi oleh pandangan sosial. Meskipun McGee, Ho & Li, (2008) melaporkan bahwa pengaruh pandangan sosial juga berbeda antar kebudayaan. Hasil penelitian di Indonesia (Surabaya) menunjukkan hasil yang sama dengan yang terjadi di Turki, yaitu pandangan di sekitar wajib pajak mempengaruhi tindakan penggelapan pajak yang dilakukan oleh WP. Hasil penelitian ini juga semakin

mendukung keabsahan teori kerja sama bersyarat yang dijabarkan oleh Traxler (2006). Traxler menyatakan jika di masyarakat yang menggelapkan pajak akan mempengaruhi WP pada masyarakat tersebut untuk semakin menggelapkan pajak.

Selain itu, hasil uji t antara usia terhadap praktik penggelapan pajak, menghasilkan nilai t hitung = 7.962 > t tabel 1.980 (df=126, $\alpha/2=0.025$) dan nilai signifikansi = 0.000 < 0.05. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa usia berpengaruh signifikan terhadap praktik penggelapan pajak. Koefisien regresi usia sebesar -0.272 menunjukkan bahwa usia berpengaruh negatif terhadap praktik penggelapan pajak, hal ini berarti apabila usia semakin muda, maka praktik penggelapan pajak semakin tinggi, atau dengan kata lain semakin tua semakin taat pajak. Berdasarkan hasil ini, hipotesis kedua penelitian yang menduga usia secara parsial berpengaruh signifikan terhadap praktik penggelapan pajak terbukti kebenarannya.

Hasil temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilaporkan oleh Alm dan Torgler yang juga didukung oleh McGee & Tyler (2007). Hasil penelitian yang didapat adalah semakin tua usia wajib pajak (responden) maka semakin mereka taat kepada peraturan perpajakan. Selain itu hasil ini bersesuaian dengan yang dilaporkan oleh Fiorio & Zanardi (2007) yang menyatakan semakin tua usia seseorang, semakin cenderung mereka menganggap penggelapan pajak adalah tindakan yang melanggar hukum. Selanjutnya temuan ini juga semakin mempertegas teori perkembangan etika yang digagas oleh Kohlberg (1963) yang menyatakan semakin tua usia seseorang semakin berkembang pula etika yang dimilikinya.

Hasil uji t antara kepercayaan terhadap pemerintah terhadap praktik penggelapan pajak, menghasilkan nilai t hitung = 6.588 > t tabel 1.980 (df=126, $\alpha/2=0.025$) dan nilai signifikansi = 0.000 < 0.05. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa kepercayaan terhadap pemerintah berpengaruh signifikan terhadap praktik penggelapan pajak. Koefisien regresi kepercayaan terhadap pemerintah sebesar -0.389 menunjukkan kepercayaan terhadap pemerintah berpengaruh negatif terhadap praktik penggelapan pajak, hal ini berarti apabila kepercayaan terhadap pemerintah semakin baik, maka dapat menurunkan praktik penggelapan pajak secara nyata. Berdasarkan hasil ini, hipotesis ketiga penelitian yang menduga kepercayaan terhadap pemerintah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap praktik penggelapan pajak terbukti kebenarannya.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan kesamaan dengan penelitian yang dilaporkan oleh Mohd Ali (2013). Mohd Ali menyatakan saat masyarakat percaya dengan kinerja pemerintah, maka praktik penggelapan pajak akan cenderung menurun. Sejalan dengan itu

penelitian Ivanyna, Moumouras & Rangazas, (2010) juga menyatakan bahwa pemerintahan yang korup sangat mempengaruhi niatan warganya dalam membayar pajak. Dengan demikian ketidaktaatan wajib pajak di Surabaya dalam membayar pajak juga dipengaruhi oleh rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Hasil ini juga mendukung pendekatan fiscal yang dikembangkan oleh Schmolders (1959) dan Hasseldine dan Bebbington (1991). Pendekatan ini menyatakan pentingnya kebijakan positif yang dikembangkan oleh pemerintah untuk meningkatkan kerjasama antara pembayar pajak dan pemerintah.

KESIMPULAN, SARAN, DAN KETERBATASAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka kesimpulannya adalah bahwa secara simultan dan parsial faktor pandangan sosial, usia, dan tingkat kepercayaan terhadap pemerintah berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak oleh wajib pajak.

Hasil analisis menyimpulkan ketiga variabel tersebut memberikan penjelasan 52% terhadap praktik pajak yang terjadi di Surabaya. Di masa yang akan datang dapat juga diteliti faktor-faktor lain yang mempengaruhi praktik penggelapan pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Alm, James & Benno Torgler (2004). Estimating the Determinants of Tax Morale. National Tax Association – Tax Institute of America. Proceedings of the Annual Meeting. 269-274.
- Demir I. C., The Role Of Selected Economic And Noneconomic Factors On Tax Evasion: An Empirical Inspection. *International Scientific Conference Young Scientists 2011*: 58-69
- Fiorio C & Zanardi A. (2007). It's a lot but let it stay" How tax evasion is perceived across Italy. *UNIMI - Research Papers in Economics, Business, and Statistics* 1048, Università degli Studi di Milano.
- Hasseldine, D. J., & Bebbington, K. J. (1991). Blending Economic Deterrence and Fiscal Psychology Models in the Design of Responses to Tax Evasion: The New Zealand Experience. *Journal of Economic Psychology*, 12(2), 299-324.
- Ivanyna M., Moumouras A., Rangazas P. 2010. THE CULTURE OF CORRUPTION, TAX EVASION, AND OPTIMAL TAX POLICY. 25 Juli 2014 diunduh dari www2.warwick.ac.uk/fac/soc/economics/news_events/conferences/mysore/programme/ivanyna.pdf

- Karlinsky S., Burton H., Blanthorne C. 2004. Perceptions of Tax Evasion as a Crime. *eJournal of Tax Research* 2(2): 226-240.
- Kohlberg, L. (1963). Kohlberg's study helped researcher's understand how and why children behave and act in certain ways when dealt with social dilemmas. The development of children's orientations toward a moral order: I. Sequence in the development of moral thought. *Vita Humana*, 6, 11-33
- McGee R. W., Ho S. S. M., Li A. Y. S. 2008. A Comparative Study on Perceived Ethics of Tax Evasion: Hong Kong Vs the United States. *Journal of Business Ethics* 77:147-158
- McGee, Robert W. and Michael Tyler (2007). Tax Evasion and Ethics: A Demographic Study of 33 Countries. International Academy of Business and Public Administration Disciplines (IABPAD) Winter Conference, Orlando, Florida, January 4-7
- McKerchar, M. (2001). Why Do Taxpayers Comply? Past Lessons and Future Directions in Developing a Model of Compliance Behaviour. *Australian Tax Forum*, 16(1), 99-134.
- Mohd Ali, N. R. 2013. The Effects of Religiosity and Taxpayers' Perceptions towards Government on Voluntary Tax Compliance. Dissertation. University of Curtin. 25 Juli 2014 diunduh dari http://espace.library.curtin.edu.au/R/?func=dbin-jump-full&object_id=192008&local_base=GEN01-ERA02
- Sandmo, A. 2005. The Theory of Tax Evasion: A Retrospective View. *National Tax Journal* Vol. 58, No. 4: 643-664.
- Schmölders, G. (1959). Fiscal Psychology: A New Branch of Public Finance. *National Tax Journal*, 12(4), 340-345.
- Suminarsasi W, Supriyadi. (2012). Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Dan Diskriminasi Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion).
- Torgler, B. 2003. To evade taxes or not to evade: that is the question. *Journal of Socio-Economics* 32: 283-302.
- Traxler, Christian (2006). Social Norms and Conditional Cooperative Taxpayers. *European Journal of Political Economy*, 26-1, pp 89-103.